

Sejak pertama kali diusulkan pada 2004, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum juga disahkan, nih.

Selama 19 tahun RUU PPRT melalui berbagai dinamika. RUU ini menjadi agenda prioritas tahunan dari 2010 sampai dengan 2014 dan mandeg di Baleg DPR RI pada 2014. Kemudian, RUU PPRT ini masuk Prolegnas Prioritas Jangka Menengah 2015-2019 dan masuk dalam Prolegnas Prioritas pada 2020. Saat ini kembali masuk Prioritas Jangka Menengah 2020-2024.

Berkali-kali masuk Prolegnas, kok belum disahkan juga, sih?

Progres Legislasi Nasional

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Diusulkan Pada : 17 Desember 2019

Disiapkan oleh : DPR

Progres RUU :



Kondisi PRT di Indonesia

Berdasarkan data terakhir dari ILO (2015), sebesar **80% PRT merupakan perempuan dan 14% adalah anak yang rentan mengalami diskriminasi, pelecehan, hingga kekerasan**. Apalagi, PRT bekerja di ranah domestik yang tidak banyak diketahui publik.

Temuan riset Jala PRT (2019) menunjukkan bahwa PRT di Indonesia **hanya menerima upah sebesar 20%-30% dari UMR**. Ditambah lagi, sebagian besar PRT belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan ataupun Kesehatan.

Para PRT juga sangat rentan mengalami kekerasan oleh pemberi kerja. Dalam satu hari, Jala PRT bisa menerima aduan kekerasan terhadap PRT sebanyak 10-11 aduan. Kekerasan yang dialami oleh para PRT ini berlapis-lapis, mulai dari kekerasan fisik, ekonomi, perdagangan manusia, hingga kekerasan seksual.

Minim Regulasi

Rendahnya upah PRT di Indonesia ini terjadi karena sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan yang secara khusus ditujukan untuk melindungi dan mendorong kesejahteraan kelompok PRT. Maka dari itu, RUU PRT ini harus segera disahkan.



Sumber: Antara Foto / Aprillio Akbar



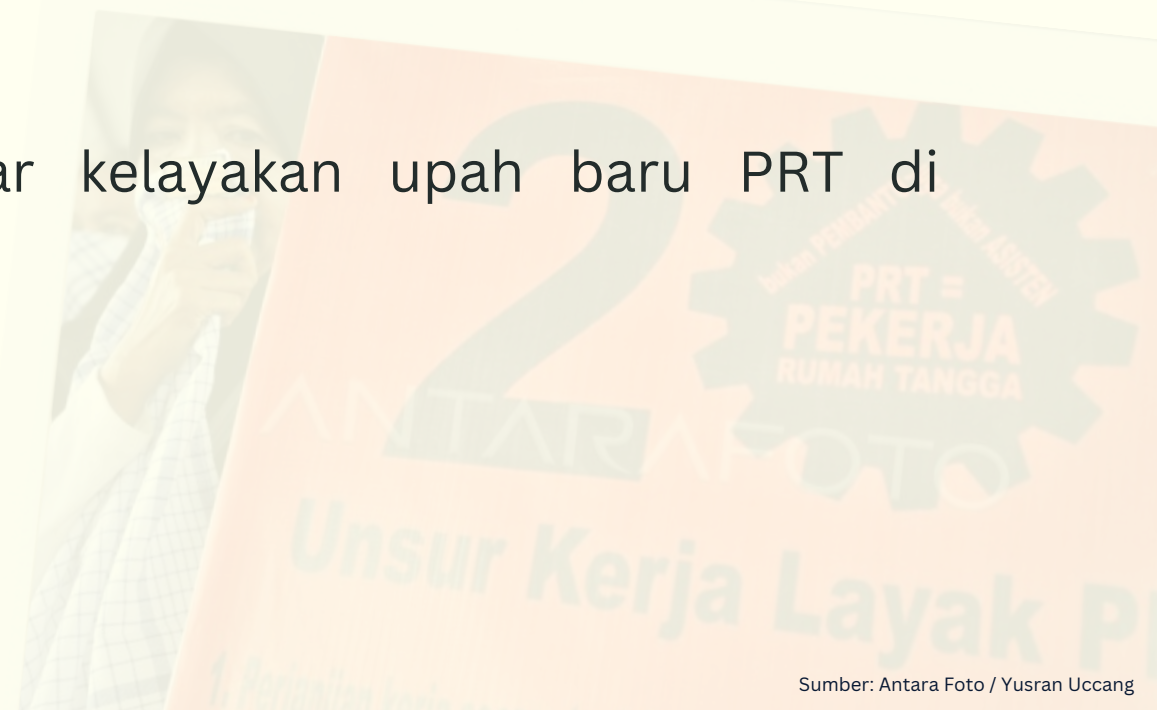
Mengapa kita perlu dukung pengesahan RUU PPRT?

Pertama, RUU PPRT adalah bentuk pengakuan negara akan status PRT sebagai pekerja, yang berhak atas perlindungan. Selama ini PRT dianggap bukan pekerja, karena ada di sektor informal.

Kedua, mengatur relasi kerja antara pekerja dan pemberi kerja agar tidak terjadi eksploitasi.

Ketiga, menjamin perlindungan hukum dari tindak kekerasan dan pelecehan

Keempat, mengatur standar kelayakan upah baru PRT di Indonesia.



Dalam rangka **memeringati International Women's Day 8 Maret 2023** lalu, masyarakat sipil yang tergabung dalam **Koalisi RUU PPRT melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI** dengan membawa empat tuntutan berikut:

1. Segera **menyelenggarakan Rapim** untuk mengagendakan pengesahan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR pada masa sidang paripurna ini 14 Maret 2023 (*sidang paripurna*).
2. **Ketua DPR RI untuk menerima atau menemui Koalisi** dan berdialog dengan para PRT serta para korban secara langsung, supaya paham bahwa situasi sudah *emergency* bagi para PRT.
3. **Koalisi mengusulkan penggantian Ketua Fraksi PDIP DPR RI** karena pernyataan dan sikapnya anti kepada para perempuan miskin yang jadi pendukung PDIP.
4. **Mengajak masyarakat untuk bersama ikut dalam aksi tenda keprihatinan di depan Gedung DPR RI** pada 11-13 Maret 2023 jelang Sidang Paripurna DPR 14 Maret 2023 untuk mendukung pengesahan RUU PPRT

Sayangnya...

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan kalau pengesahan RUU PPRT **ditunda**, karena untuk mengesahkannya di sidang paripurna RUU PPRT harus terlebih dahulu dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Rapat di Bamus ini baru akan diagendakan setelah masa reses periode ini berakhir pada 13 Maret 2023.





Mari kita kawal terus pengesahan RUU PPRT!

REFERENSI

Aditya, N. R. (2023, March 8). Koalisi Sipil Tuntut RUU PPRT Disahkan: Mbak Puan, Sudah 19 Tahun, Apa yang Sulit? Kompas.com. Retrieved March 10, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/08/14355421/koalisi-sipil-tuntut-ruu-pprt-disahkan-mbak-puan-sudah-19-tahun-apa-yang>

Firmansyah, M. J. (2023, March 10). Protes Pengesahan Rancangan UU PPRT Ditunda, PRT Bakal Kemping di Depan DPR. Nasional Tempo.co. Retrieved March 10, 2023, from <https://nasional.tempo.co/read/1700855/protes-pengesahan-rancangan-uu-pprt-ditunda-prt-bakal-kemping-di-depan-dpr>

Karunia, A. M. (2023, February 15). Tiap Hari Ada Laporan 10-11 Kasus Kekerasan Pekerja Rumah Tangga, Wakil Ketua MPR: Itu Bukan Angka Sedikit. Money Kompas.com. Retrieved March 10, 2023, from <https://money.kompas.com/read/2023/02/15/171008226/tiap-hari-ada-laporan-10-11-kasus-kekerasan-pekerja-rumah-tangga-wakil-ketua>

Prayoga, F. (2023, March 9). Puan Maharani Sebut Keputusan Tunda Pengesahan RUU PPRT Atas Kesepakatan Rapim DPR. Kompas TV. Retrieved March 10, 2023, from <https://www.kompas.tv/article/385984/puan-maharani-sebut-keputusan-tunda-pengesahan-ruu-pprt-atas-kesepakatan-rapim-dpr>

Sundari, E. K. (2023, February 17). Valuasi Ekonomi dan Sosial Kerja PRT. Media Indonesia. Retrieved March 10, 2023, from <https://mediaindonesia.com/opini/558882/valuasi-ekonomi-dan-sosial-kerja-prt>

Sumber Foto
antarafoto.com
lpmprogress.com